

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, organisasi nirlaba didirikan dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat melalui inisiatif sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau lingkungan. Mengabaikan kontribusi organisasi terhadap proses pembangunan bangsa adalah sebuah kesalahan. Organisasi nirlaba meliputi rumah sakit, rumah ibadah, sekolah umum, dan inisiatif sukarelawan. Sebagai organisasi keagamaan, Gereja tidak menerima bantuan keuangan dari sumber lain. Sejak pendiriannya, Gereja telah terlibat dalam pengelolaan dan administrasi uang dan harta benda. Untuk mematuhi peraturan Gereja, paroki perlu membentuk tim keuangan. Gereja juga berfokus pada pengelolaan properti gerejawi. Transparansi dan integritas penuh diperlukan dalam melaporkan semua aspek administrasi keuangan dan properti Gereja. Laporan keuangan Paroki sangat penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan dapat melihat laporan keuangan untuk memantau perusahaan dan kepemimpinannya. Data keuangan sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain dan untuk membuat keputusan yang tepat. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menetapkan pedoman untuk pembuatan laporan keuangan, dan laporan keuangan Paroki harus mematuhi pedoman ini. IAI, singkatan dari International Aerospace Industries, didirikan pada tahun 2004.

PSAK 45, seperangkat standar pelaporan keuangan yang dirancang khusus untuk bisnis nirlaba, diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 23 Desember 1997. DSAK kemudian digabungkan ke dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Persyaratan tersebut kemudian direvisi pada tahun 2011 dan 2019. Pada tanggal 11 April 2009, DSAK secara resmi menyetujui penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK). ISAK merupakan kumpulan peraturan yang komprehensif yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Peraturan ini akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK 35 bertujuan untuk menjelaskan isi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, khususnya paragraf 05. Paragraf ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana organisasi dengan fokus nirlaba dapat mengubah deskripsi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mereka atau deskripsi laporan keuangan secara keseluruhan. Contoh ilustrasi dari dasar temuan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35 ditawarkan oleh <http://iaiglobal.or.id/>.

Pendirian organisasi nirlaba dan organisasi nirlaba tidak terjadi secara instan. Kesehatan keuangan suatu organisasi sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjangnya. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari adanya standar pelaporan dan protokol yang cermat dalam menghasilkan laporan keuangan. Perencanaan program dilakukan di awal tahun dengan anggaran yang telah ditentukan, sementara evaluasi program dilakukan di akhir tahun untuk mengevaluasi keberhasilan program dan pengaruhnya terhadap individu.

Analisa terhadap laporan keuangan organisasi non laba, dalam hal ini ~Laporan Keuangan Paroki XX~ yang sudah sesuai dengan pedoman yang ada, akan

sangat membantu daya serap anggaran dan dampak bagi umat (pelayanan). Dana atau uang yang ada selama ini, akan kelihatan penggunaannya. Masihkah sebatas untuk kegiatan rutin (inventaris barang-barang), atau menyentuh kepada perkembangan daya juang umat dalam hidup dan pelayanan, peningkatan ekonomi umat menuju kepada hidup yang sejahtera.

Laporan keuangan Paroki XX yang berpedoman pada aturan yang ada, akan menjadi jaminan keberlangsungan kehidupannya. Melalui laporan yang akuntabel akan diperoleh stabilitas pemasukan dan pengeluaran, alokasi dan pemanfaatan dana, pengontrolan pemanfaatan dana yang ada, jaminan *running* hidup dan pelayanan di waktu-waktu berikutnya. Jika tidak, pengeluaran tiap tahun untuk aneka *cost* kepentingan hidup dan pelayanan dengan pemasukan tidak pernah terkontrol. Pada kenyataannya, sering serapan dana lebih tertuju kepada perlengkapan Gereja secara fisik, sementara pengembangan iman, ekonomi umat, perhatiannya sedikit.

Contoh organisasi nirlaba keagamaan adalah gereja. Gereja berfungsi sebagai manifestasi karya Tuhan di dunia. Visibilitas gereja meluas ke ranah lain, termasuk kesejahteraan, struktur fisik, dan infrastruktur. Oleh karena itu, gereja ada sebagai entitas surgawi dan makhluk fana di dalam dunia. Individu yang memberikan sumbangan kepada gereja tanpa mengharapkan balasan apa pun menyumbangkan sumber daya keuangan yang diperlukan bagi lembaga keagamaan tersebut untuk menopang kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, Gereja Katolik dan paroki-parokinya sangat menghargai manajemen keuangan yang efektif yang bertanggung jawab dan beralasan. Gereja mengakui pentingnya mempertahankan kriteria yang

ketat tentang ketidakberpihakan, keterbukaan, dan tanggung jawab bagi para manajer propertinya.

Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga keuangan yang seharusnya 4 bendahara dan 1 karyawan (bagian keuangan). Namun hanya ada 1 bendahara dan 1 karyawan keuangan. Meskipun sudah diganti personil, namun mereka tidak mempunyai kompetensi di bidang keuangan. Sehingga tugas-tugas petugas keuangan dilakukan oleh karyawan Paroki. Hal ini tentu saja mengganggu dinamika pelayanan, pekerjaan, dan job des yang tumpang tindih.

Keuskupan Agung Semarang, *~kemudian disebut KAS~*, adalah entitas tingkat yang lebih tinggi dalam Gereja Katolik, yaitu di dalam Paroki XX. Keuskupan Agung Semarang berusaha untuk menjadi lembaga gerejawi yang dapat diandalkan dan sarana untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan, sekaligus mengelola urusan keuangan Paroki. Sesuai dengan Surat Keputusan 0010/C/I/a-4/08 yang dikeluarkan oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan, *~sebagai lembaga yang lebih tinggi dari Gereja~*, menggunakan dan mengesahkan Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) dan Pedoman Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) untuk memastikan pengelolaan keuangan Gereja yang transparan dan dapat dipercaya. PTKAP terdiri dari Akuntansi Aset, Akuntansi Kewajiban, Akuntansi Aset Bersih, Akuntansi Pendapatan dan Biaya, Laporan Arus Kas, Contoh Laporan Keuangan, Pedoman Anggaran Paroki, dan Pendahuluan yang menguraikan fitur dan tujuan Paroki. Namun demikian, PKAP memiliki beberapa bagian yang menggambarkan strategi optimal untuk administrasi keuangan. Lampiran-lampiran tersebut dibagi menjadi lima bagian: I-V untuk Tujuan Teknis

dan Tujuan Khusus, II-VI untuk Kebijakan Umum Keuangan Paroki, IV-V untuk Akuntansi Paroki, dan VI-VI untuk Penutup. Penggunaan PKAP dan PTKAP seharusnya memudahkan pengelolaan keuangan paroki. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang dapat secara efektif memastikan akuntabilitas dan keterbukaan. Penulis memberikan pengarahan ini karena tidak semua staf keuangan Paroki XX memiliki pemahaman yang lengkap tentang akuntansi.

Keuskupan Agung Semarang memberikan dukungan kepada banyak organisasi keagamaan, terutama Gereja Katolik. Paroki XX merupakan salah satu paroki yang termasuk dalam Keuskupan Agung Semarang. Oleh karena itu, Paroki XX harus membuat dan menyerahkan laporan keuangan kepada Keuskupan untuk tujuan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penulis menyoroti kekurangan yang teridentifikasi dan mengusulkan solusi untuk mengatasi laporan keuangan tersebut. Setiap paroki diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Lokal. Paroki diharuskan untuk membuat banyak laporan, termasuk anggaran, neraca, laporan pendapatan dan pengeluaran yang terperinci, catatan biaya, dan daftar inventaris. Gambaran ringkas tentang pergerakan uang masuk dan keluar dari sebuah entitas. Laporan mengenai dana yang dibatasi penggunaannya (O. Fransiskus Randa, 2011). Organisasi nirlaba keagamaan menyediakan layanan yang mencakup akuntabilitas melalui penggunaan dokumentasi, pelaporan, dan penilaian (Aceh et al., n.d.). Dengan menjalani prosedur ini, mereka yang telah memberikan kontribusi keuangan dimintai pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Untuk menunjukkan akuntabilitas, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan tindakan mereka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas hasil yang diperoleh (Mardiasmo, 2018). Sebagai bagian dari prosedur ini, kepala sekolah dapat menerima, menunjukkan, atau mengkomunikasikan laporan keuangan. Gagasan kontemporer tentang akuntabilitas tidak hanya mencakup pemanfaatan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang mahir dan berhasil, tetapi juga manajemen dan tata kelola yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan. Akuntabilitas spiritual mencakup kewajiban etis dan aspek spiritual yang harus diupayakan oleh organisasi amal. Baik anggota maupun pemimpin diharuskan untuk mematuhi keyakinan spiritual organisasi yang diproklamirkan (Francis Randa, 2011). Tanggung jawab gereja ditentukan oleh aspek spiritual dan sosial karena statusnya sebagai lembaga keagamaan yang memiliki komponen teologis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi nirlaba untuk mencapai stabilitas keuangan, sangat penting bagi mereka untuk menjaga transparansi dan integritas dalam interaksinya dengan para donor dan pemangku kepentingan eksternal (Agusmasnita, 2014). Akuntabilitas adalah elemen yang paling penting dalam operasi perusahaan mana pun. Akuntabilitas berfungsi sebagai ukuran kepercayaan publik (Nuraini, 2011). Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam bisnis karena secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi (Kaomaneng, n.d.). Akuntabilitas diperlukan untuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah serta entitas nirlaba. Kelompok-kelompok agama masih dianggap eksentrik. Namun, beberapa ahli telah meneliti

proses akuntansi Gereja. Penggunaan sistem akuntansi teologis oleh GKBI dan keterlibatan personil yang ahli dalam mengawasi administrasi keuangan menjamin kemampuan Gereja untuk mengelola dananya secara efektif (Gede, 2015). Terlepas dari kerangka hukumnya, semua organisasi nirlaba diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Organisasi nirlaba menggunakan ISAK (Standar Akuntansi Keuangan) untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di masa depan, di samping SAK ETAP. Laporan keuangan entitas berorientasi non laba dibuat dengan menyesuaikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan setidaknya isi laporan keuangan yang sesuai dalam PSAK 1; Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan menganalisa pelaporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 tentang pelaporan nirlaba.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaporan keuangan Paroki XX sudah sesuai dengan Pedoman keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) dan Petunjuk Teknis Keuangan Akutansi Paroki (PTKAP)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk:

Mengetahui apakah pelaksanaan pelaporan keuangan Paroki XX sudah sesuai dengan Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) dan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) sehingga dapat sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi manfaat bagi pihak – pihak terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagi Gereja / Paroki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan laporan keuangan Gereja. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan kerangka kerja teoritis untuk meningkatkan manajemen Gereja dengan menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan pada PKAP dan PTKAP. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan dialokasikan untuk infrastruktur fisik, inventaris barang, dan kemajuan kesejahteraan ekonomi dan spiritual individu.

2. Bagi Penulis

Dalam rangka memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menyelesaikan perkuliahan dan untuk memperluas pemahaman penulis mengenai organisasi sektor publik, khususnya entitas nirlaba dan laporan keuangan organisasi nirlaba, yaitu Gereja.

3. Bagi Univeristas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah untuk tesis di Universitas Ngudiwaluyo. Penelitian ini akan dapat diakses oleh semua

mahasiswa, dosen, dan karyawan di universitas, dan juga akan berfungsi sebagai kerangka kerja panduan untuk peneliti di masa depan.